



KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TKDN IM, IB, DAN TKDN IK

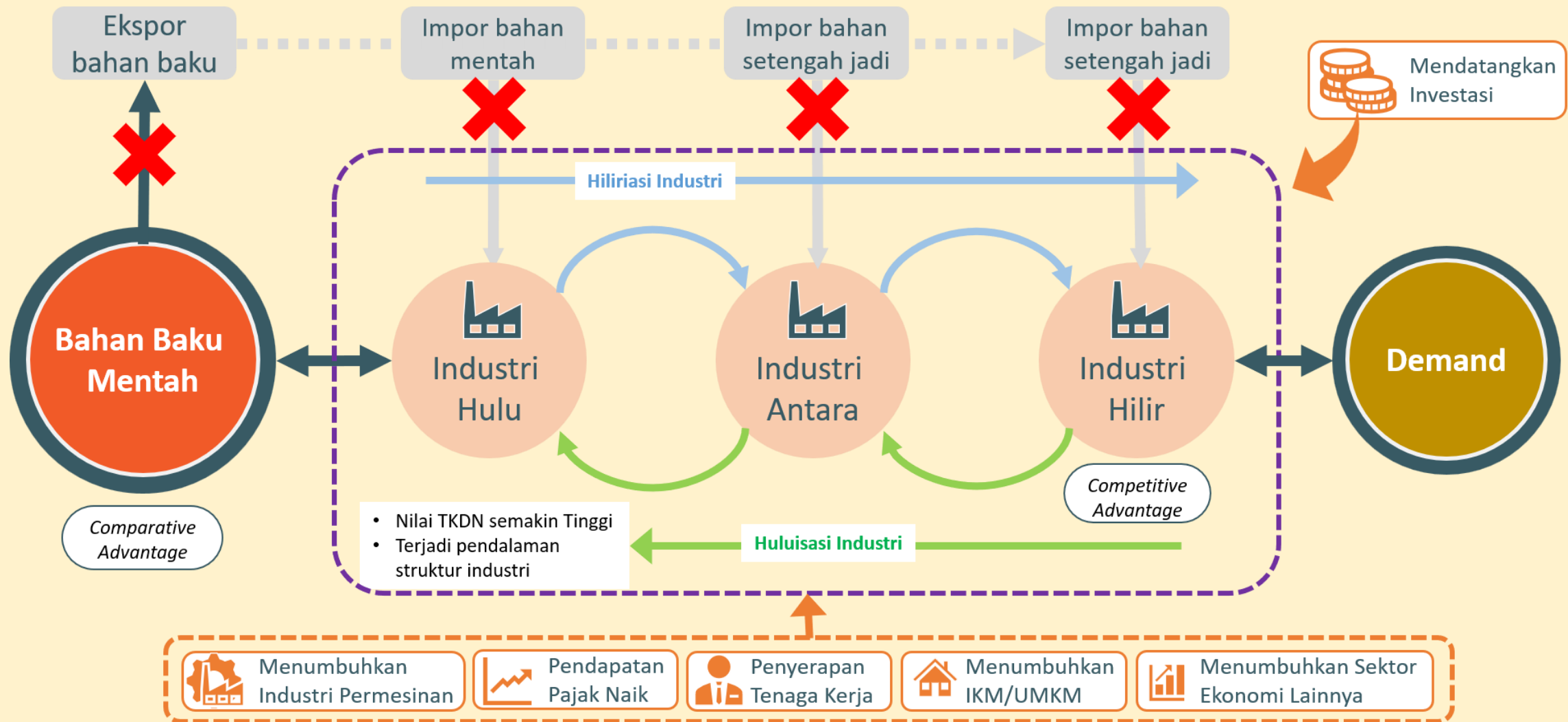
Disampaikan pada acara:

Bimbingan Teknis Optimalisasi Pendataan Industri Kecil Melalui SIINas
Serpong, 9 Maret 2023

01

PENDAHULUAN

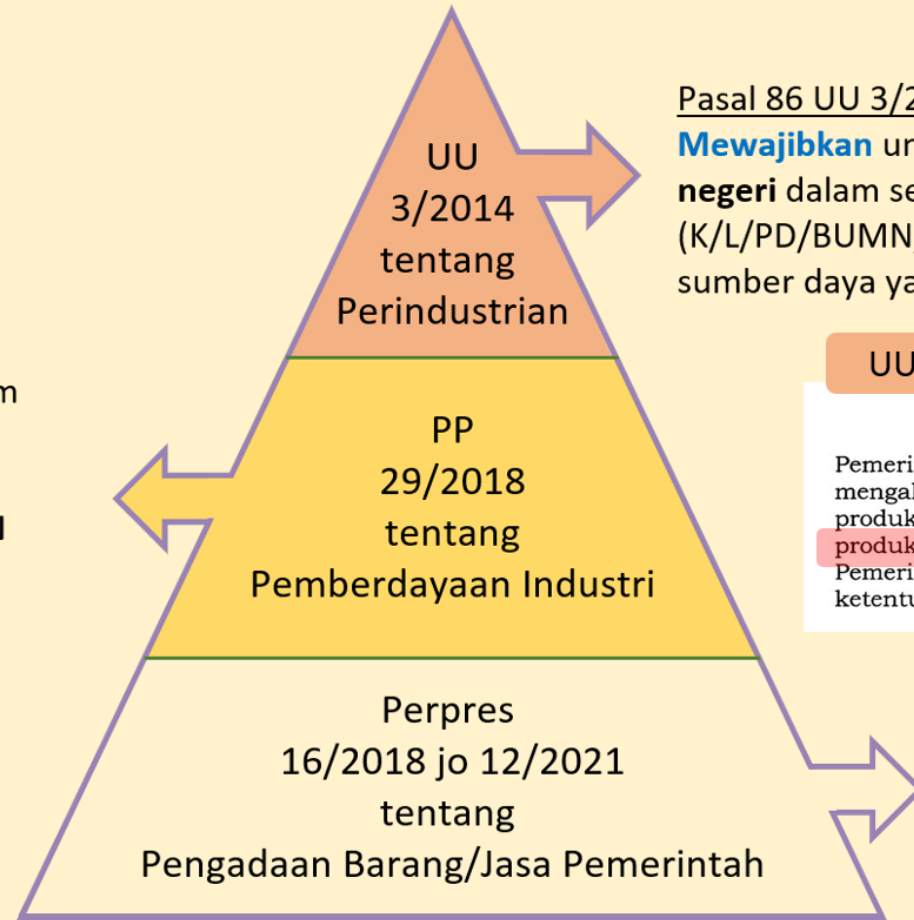
MANFAAT STRATEGIS TKDN



Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah **terdapat** produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan **BMP paling sedikit 40%**

Sertifikat BMP ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, mewakili satu perusahaan, berlaku selama 3 Tahun dengan nilai maksimal 15%.



Pasal 86 UU 3/2014:

Mewajibkan untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara)

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 97

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil **produksi dalam negeri** dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 Perpres 12/2021:

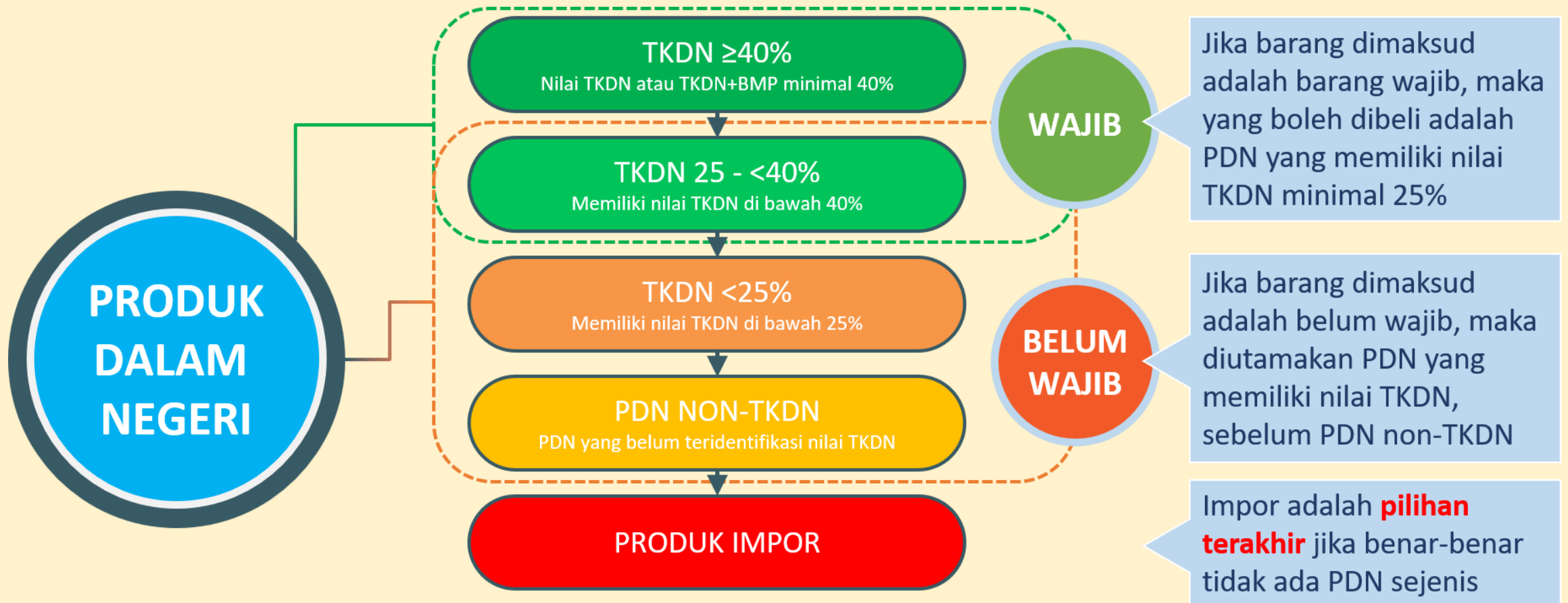
Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait

URUTAN PEMBELIAN PRODUK DALAM NEGERI

Slide #

6



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pasal 70

- (1) Penghitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan penghitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya.

LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN PENGHITUNG TKDN

Slide #

8

Permenperin
57/2006



Menunjuk **PT Sucofindo** dan **PT Surveyor Indonesia**
sebagai Surveyor Independen Penghitungan TKDN

Amanat Permenperin 43/2022

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA P3DN

PENDAFTARAN CALON LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN
NILAI TKDN DAN NILAI BMP

PERIODE PENDAFTARAN
20 FEB
SAMPAI DENGAN
6 MAR
2023

terbuka untuk siapapun!*

*)UNDUH KETENTUAN/SYARAT:
<https://s.id/syaratCLVITKDN>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pasal 69

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN

Slide #

10



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN

*COST
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017

Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN Untuk PLTS

*PRODUCT
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan
Komputer Tablet

*PRODUCT
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Produk Farmasi

*PROCESS
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Produk Elektronika dan Telematika

*PROCESS
+ COST
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022

Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan
Penghitungan Nilai TKDN KLBB (*Battery Electric Vehicle*)

*PROCESS
+ COST
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*

*COST
BASED*



Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN
Untuk Industri Kecil

*COST
BASED*

DAFTAR INVENTARISASI BARANG

Slide #

11

← → ↻ ⓘ Not secure | tkdn.kemenperin.go.id

← → ↻ ⓘ Not secure | tkdn.kemenperin.go.id

Rekapitulasi
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan

Download Excel

unduh rekapitulasi:
http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php

Sertifikat TKDN
Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

Referensi
Daftar referensi produk dalam negeri

MELIHAT DATA TKDN IK DI SINI

E-Lapor adalah portal pengaduan bagi produsen PDN yang dirugikan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah/badan usaha.

Sertifikat
Data Sertifikat TKDN dan BMP yang telah diterbitkan oleh

Rekapitulasi
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang

TKDN IK
Data Sertifikat TKDN IK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

FAQ
Informasi umum mengenai Program Peningkatan

Regulasi
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN

Video
Video Program P3DN dan TKDN

Referensi
Daftar referensi produk dalam negeri

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

e-lapor

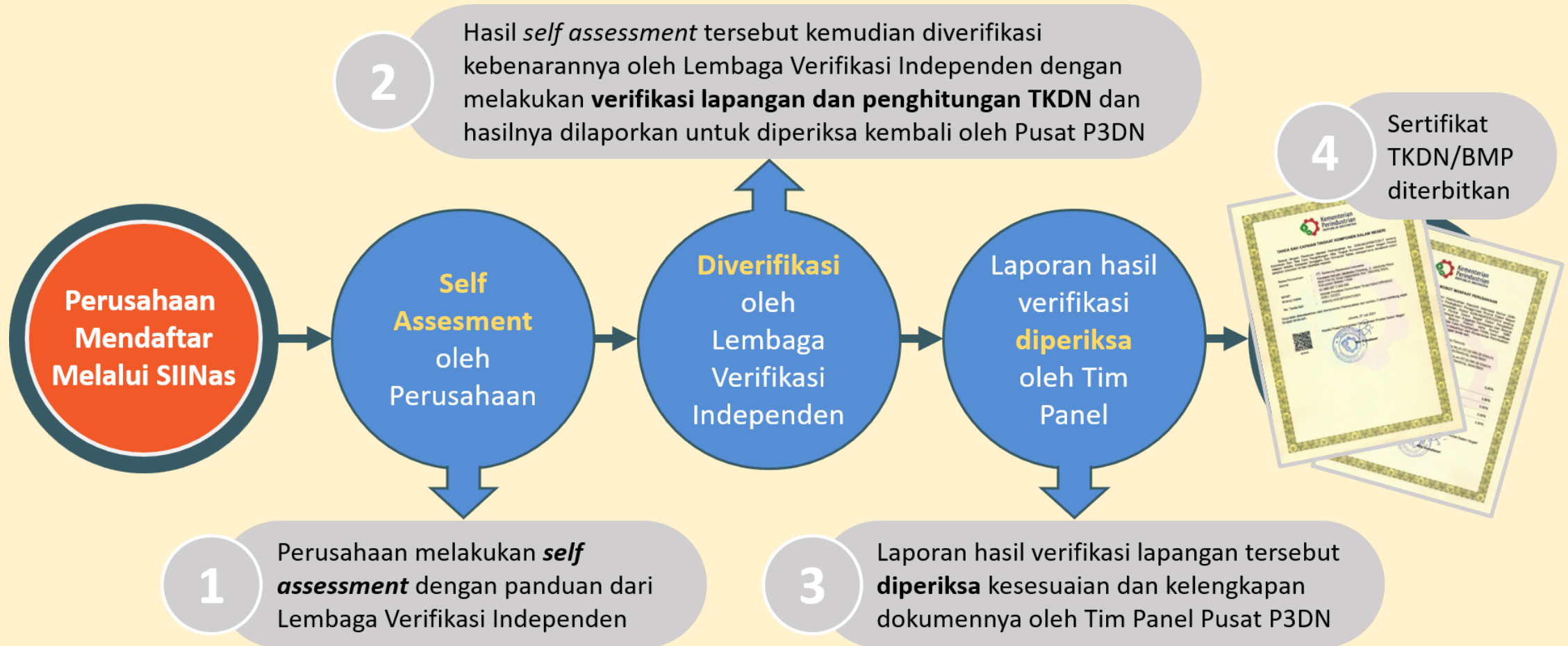
02

TKDN IM
TKDN IB

PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG

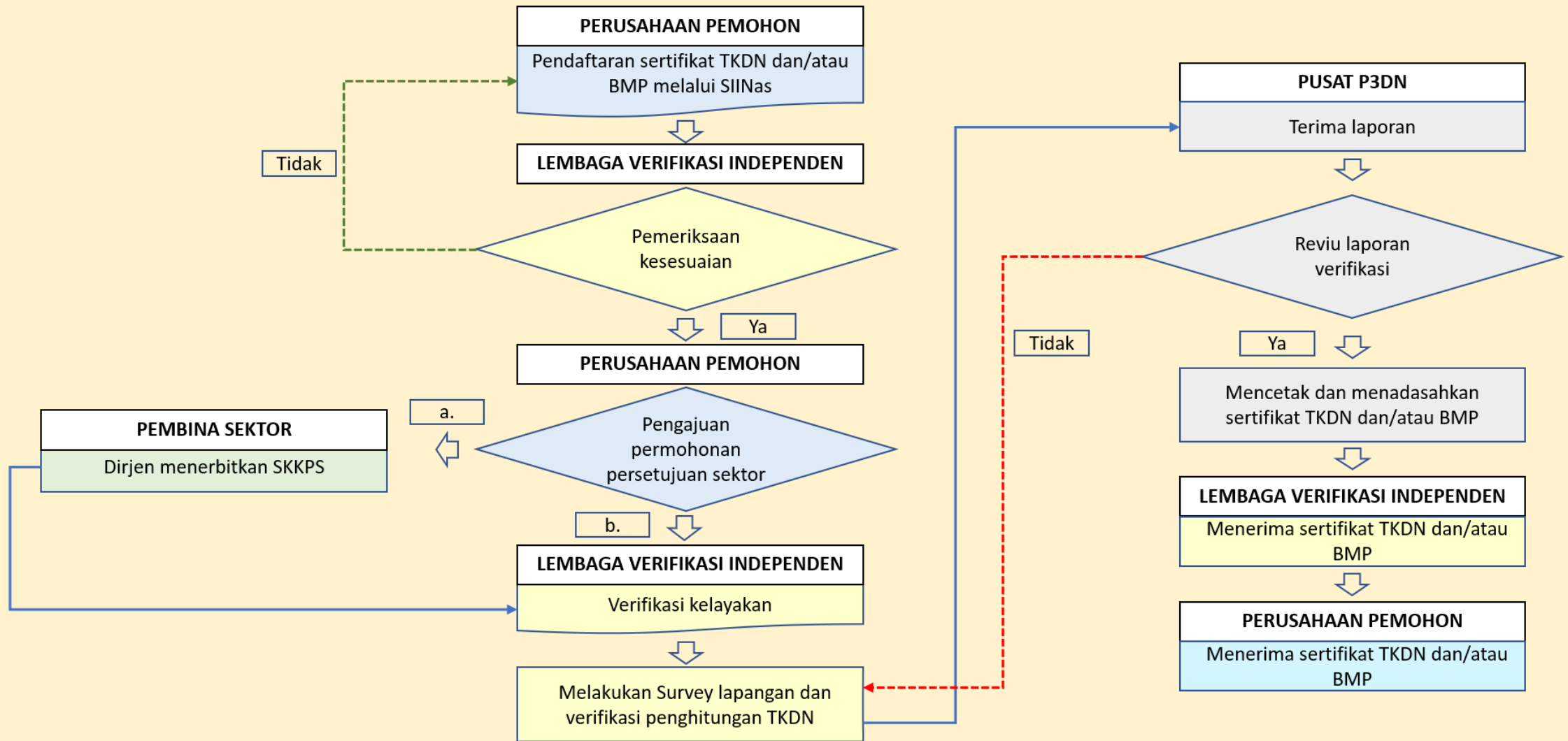
Slide #

13



Proses sertifikasi TKDN dilakukan **berlapis** untuk menjaga **kebenaran dan kesesuaian** atas nilai TKDN yang diberikan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SERTIFIKASI



PENGAJUAN TKDN MELALU SIINAS

Slide #
15



The screenshot shows the SIINAS website interface. The browser address bar displays "siinas.kemenperin.go.id". The navigation menu includes "Home", "e-Reporting", "e-Services", "Data & Informasi", "Kode Referensi", "Contact Us", and "Data Perusahaan". A notification for "PT Indo Pangan" is visible in the top right corner. Below the navigation bar, there are two promotional banners: a green one for a survey and a yellow one for commodities. The main banner features the G20 Indonesia 2022 logo, the Ministry of Industry logo, and the slogan "Ayo Ikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/ atau Peralatan IKM Tahun Anggaran 2022". The banner also includes a cartoon character and an illustration of industrial machinery.

Home

Klik disini untuk mengisi Survey Kinerja Industri Pengguna Gas Bumi

Ada 3 jenis komoditas yang sedang dibutuhkan oleh Kementerian Perindustrian. Perusahaan anda mungkin bisa memasok komoditas tsb.

G20 INDONESIA 2022

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

MAKING INDONESIA 4.0

RESILIEN, EKSTRA, DAN ADAPTIF

Ayo Ikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/ atau Peralatan IKM Tahun Anggaran 2022

CONTOH SERTIFIKAT TKDN

Slide #

16

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi hasil verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Hasil Produksi : Industri Produk Farmasi (KBLI: 21012, Tahun 2009)
Jenis Produk : Obat Branded/Mitu
Kode HS : 30049099
Nama Obat :
Bentuk Sediaan :
Kemasan :
No. Izin Edar :
Nilai TKDN : 37,00%
Terbilang : Tiga puluh tujuh koma nol nol persen

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,
diberikan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Bidang Usaha : Industri Produk Farmasi (KBLI: 21012, tahun 2009)
No. Tanda Sah :

Jakarta, 28 Juli 2021

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Nila Kumalasari

#24062

Catatan :

- Sertifikat TKDN Barang ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat TKDN dapat mewakili lebih dari satu jenis produk.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan komoditi Izin Usaha Perusahaan.
- Sertifikat TKDN berlaku 3 Tahun kecuali Produk Farmasi berlaku selama 2 Tahun.

CONTOH SERTIFIKAT BMP



Catatan :

- Sertifikat BMP ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat BMP mewakili satu perusahaan.
- Sertifikat BMP berlaku selama 3 Tahun.
- Nilai maksimal BMP adalah 15%.

Objek yang dinilai	Kriteria	Bobot	BMP max
Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	Minimal Rp500.000.000	5%	4,50%
	Setiap kelipatan Rp500.000.000	5%	(30% dari 15%)
Kepemilikan sertifikat: • Kesehatan, Keselamatan kerja (30%) • Pemeliharaan lingkungan (70%)	Tidak Ada Sertifikat	0%	3,0%
	Ada Sertifikat	20%	(20% dari 15%)
Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan	Minimal Rp250.000.000	3%	4,50%
	Setiap kelipatan Rp250.000.000	3%	(30% dari 15%)
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	Investasi minimal Rp1.000.000.000	5%	3,00%
	Setiap kelipatan Rp1.000.000.000	5%	(20% dari 15%)

TOTAL BMP MAKSIMUM = 15%

REKAP PRODUK BERSERTIFIKAT TKDN

Slide #

18

No	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat		Nilai Capaian TKDN		
		Berlaku	Seluruhnya	<25%	25-40%	> 40%
1.	Bahan Penunjang Pertanian	979	1164	50	127	1175
2.	Mesin dan Peralatan Pertanian	542	775	32	254	413
3.	Mesin dan Peralatan Pertambangan	18	48	9	15	16
4.	Mesin dan Peralatan Migas	931	1915	321	681	560
5.	Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling	58	114	13	35	20
6.	Mesin dan Peralatan Pabrik	80	178	8	44	41
7.	Bahan Bangunan/Konstruksi	2212	2952	102	267	3095
8.	Logam dan Barang Logam	1750	2822	175	426	2138
9.	Bahan Kimia dan Barang Kimia	2110	3731	547	864	1335
10.	Peralatan Elektronika	1170	1428	319	808	787
11.	Peralatan Kelistrikan	2261	4828	383	788	3057
12.	Peralatan Telekomunikasi	774	1668	47	772	107
13.	Alat Transport	181	310	9	111	80
14.	Bahan dan Peralatan Kesehatan	3286	4201	287	3893	2781
15.	Peralatan Laboratorium	4	8	0	3	1
16.	Komputer dan Peralatan Kantor	405	569	43	190	652
17.	Pakaian dan Perlengkapan Kerja	679	880	9	96	656
18.	Peralatan Olahraga dan Pendidikan	353	465	14	192	312
19.	Sarana Pertahanan	46	146	4	5	132
20.	Barang Lainnya	5446	6462	240	1342	5436
Total		23285	34664	2612	10913	22794

Rata-rata sertifikat berlaku selama 3 tahun, jika sudah habis masa berlaku dapat disertifikasi ulang.

Sudah terdapat

36.319

Produk Dalam Negeri
ber-TKDN

22.794

Produk Dalam Negeri
dengan nilai TKDN di atas
40%

(Barang Wajib)

Data tanggal:

9 Maret 2023, 10.34 WIB

sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php

catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk



FASILITASI SERTIFIKASI TKDN GRATIS



kuota sebanyak
2000
sertifikat produk



setiap perusahaan
dapat difasilitasi
maksimal 8 (delapan)
sertifikat produk



untuk
perusahaan industri
**skala
menengah**

modal usaha >Rp5m sampai
Rp10m (diluar tanah bangunan)

*) perusahaan industri skala
non-menengah dapat difasilitasi
setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Kemenperin



*)berlaku sampai
desember 2023

informasi lebih lanjut:



0812-3644-6344

@pusat_p3dn

PT Sucofindo
Telp. 021 - 7983666 ext 2390
CP: Nano Suprayogi

PT Surveyor Indonesia
Telp. 021 - 5265526 ext 818
CP: Lebrina Eka Fitriani

PENGAWASAN DAN SANKSI PELANGGARAN P3DN/TKDN

Slide #
20



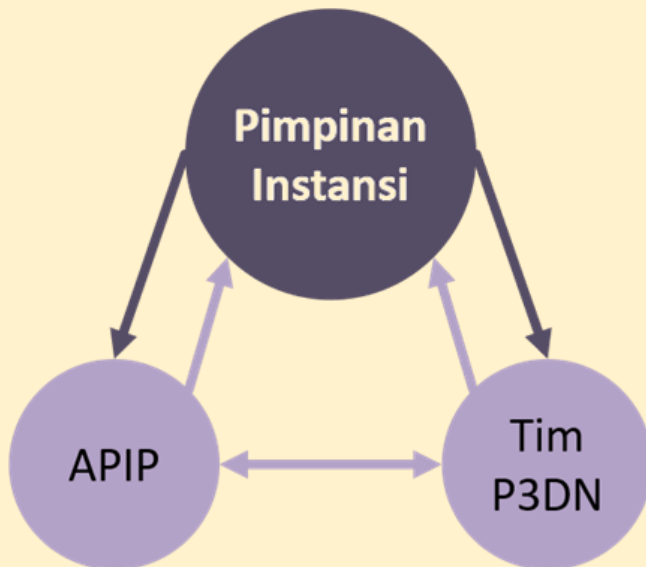
PENGAWASAN

PP 29/2018
Pasal 76

dilakukan oleh:
**APIP, Pejabat Pengawas
Internal, Tim P3DN**

Perpres 16/2018
Pasal 76

dilakukan oleh:
**Pimpinan instansi
melalui APIP**



SANKSI



**LEMBAGA VERIFIKASI
PP 29/2018 Pasal 106**

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN



**PRODUSEN BARANG/
PENYEDIA JASA
PP 29/2018 Pasal 109-110**

Sanksi yang diberikan:

- Pencabutan sertifikat TKDN
- Pencantuman dalam daftar hitam



**PEJABAT PENGADAAN
PP 29/2018 Pasal 107-108**

Sanksi yang diberikan:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif
Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000
- Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa

- Denda administratif
 - Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
 - 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor

03

TKDN IK



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI KECIL

- Menimbang :
- bahwa untuk pemberdayaan industri kecil dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perlu diatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil;

PERMENPERIN TKDN IK

Menggratiskan dan mempermudah proses sertifikasi TKDN bagi **Industri Kecil** agar bisa ikut serta dalam PBJP dan menjadi prioritas untuk dibeli, serta mendapatkan **preferensi harga**

Mudah

Sertifikat TKDN IK bersifat *self-assessment* dan dapat dicetak secara mandiri.

Cepat

Sertifikat TKDN IK disahkan maksimal 5 (lima) hari kerja*.

Murah

Proses sertifikasi tidak dipungut biaya sama sekali.

100% GRATIS

KLASIFIKASI INDUSTRI KECIL

Slide #

23

- Skala Usaha:
 1. Mikro
 2. Kecil
 - ~~3. Menengah~~
 - ~~4. Besar~~
- Jika pada NIB tidak ada data klasifikasi usaha, maka dianggap non kecil



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	:	
2. Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
Email	:	
3. Status Penanaman Modal	:	
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	:	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	:	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Desember 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

PP 7/2021 Pasal 35 ayat (3)

klasifikasi usaha mikro dan kecil: memiliki modal usaha Rp0-Rp5M, tidak termasuk tanah dan bangunan

NILAI TKDN IK

berdasarkan **akumulasi dari Komponen Dalam Negeri (KDN)** yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk

faktor produksi tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran

penghitungan nilai TKDN IK **dilakukan untuk masing-masing jenis dan spesifikasi produk**

tidak dapat dilakukan untuk kegiatan industri tertentu seperti Industri Perlengkapan Komputer (KBLI 26220), Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (KBLI 26320), Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi (KBLI 26410)

KOMPONEN PENGHITUNGAN TKDN IK

Slide #
25

1 BAHAN/MATERIAL UTAMA (24%)

diperhitungkan 100% apabila penyedia bahan/material utama berkedudukan di NKRI, dan 0% jika tidak berkedudukan di NKRI

2

TENAGA KERJA (10%)

diperhitungkan 100% apabila tenaga kerja langsung adalah WNI, dan 0% jika bukan WNI

NILAI
TKDN
IK

diperhitungkan 100% apabila penyedia biaya tidak langsung berkedudukan di NKRI, dan 0% apabila tidak berkedudukan di NKRI

diperhitungkan 100% apabila pelaksana pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk merupakan K/L atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan 0% jika selain itu

3 FACTORY OVERHEAD (4%)

meliputi: biaya alat kerja, biaya air, dan/atau biaya listrik

4

PENGEMBANGAN (2%)

meliputi: pendaftaran HaKI, sertifikasi (SNI, industri hijau, halal) dan/atau biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk

PROSES SERTIFIKASI TKDN BARANG UNTUK INDUSTRI KECIL

Slide #
26

DAFTAR/REGISTRASI AKUN SIINAS

<https://siinas.kemenperin.go.id>

Perusahaan harus sudah
memiliki NIB/IUI

INPUT DATA PERUSAHAAN

1. Mengisi data umum
2. Mengisi alamat kantor pusat
3. Mengisi alamat pabrik
4. Bidang Usaha
5. Perizinan (NPWP, IUI, dll)

SELF ASSESMENT

- a. bahan/material utama (bobot 24%)
- b. tenaga kerja (bobot 10%)
- c. *factory overhead* (bobot 4%)
- d. Pengembangan (bobot 2%)

Agar dapat dihitung dengan Permenperin TKDN
IK, produk **Alkes** dan **Farmasi** harus memiliki
Sertifikat Izin Edar terlebih dahulu

No.	KBLI	KELOMPOK
1.	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
2.	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
3.	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
4.	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
5.	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI

Kelompok Kerja Verifikasi
ditetapkan oleh Menteri

Verifikasi dilakukan terhadap:

- penghitungan nilai TKDN IK; dan
- kelengkapan dan kebenaran isian data dan dokumen permohonan

VERIFIKASI

Kelompok Kerja Verifikasi

5 (lima) hari kerja

SERTIFIKAT TERBIT

Cetak sertifikat secara mandiri

PENGAJUAN TEKNOLOGI MELALUI SAINS

Slide #

27



CONTOH SERTIFIKAT TKDN IK

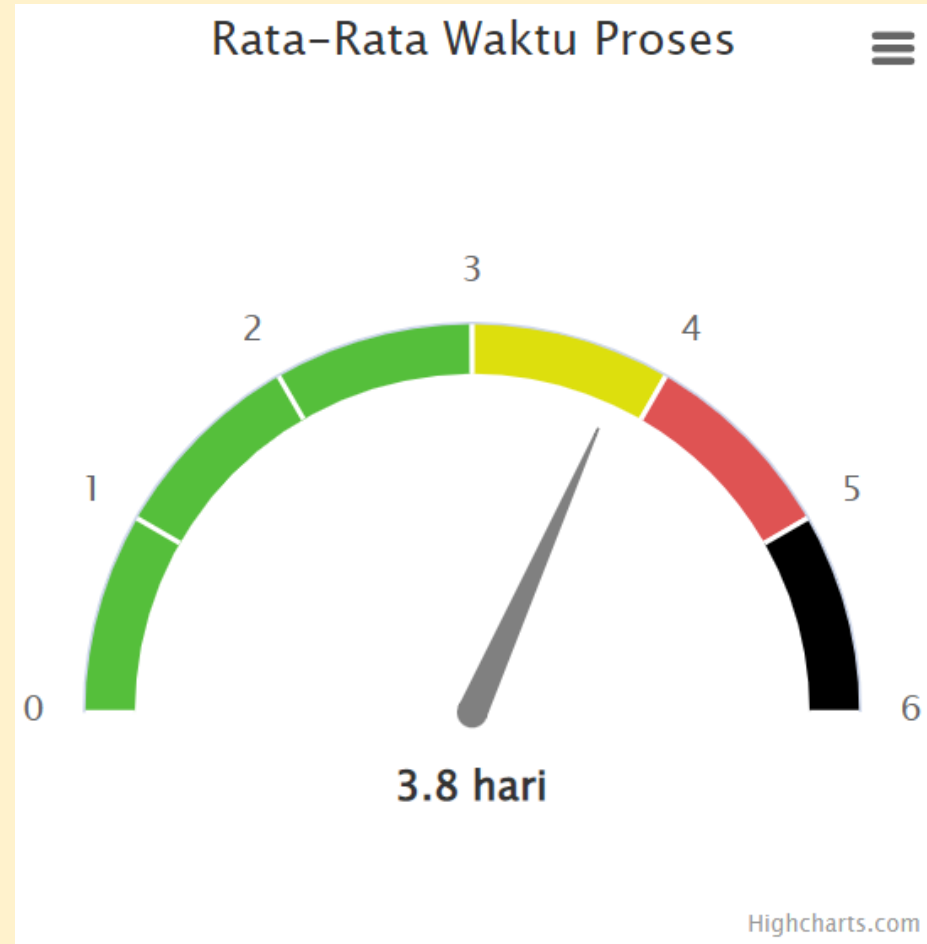
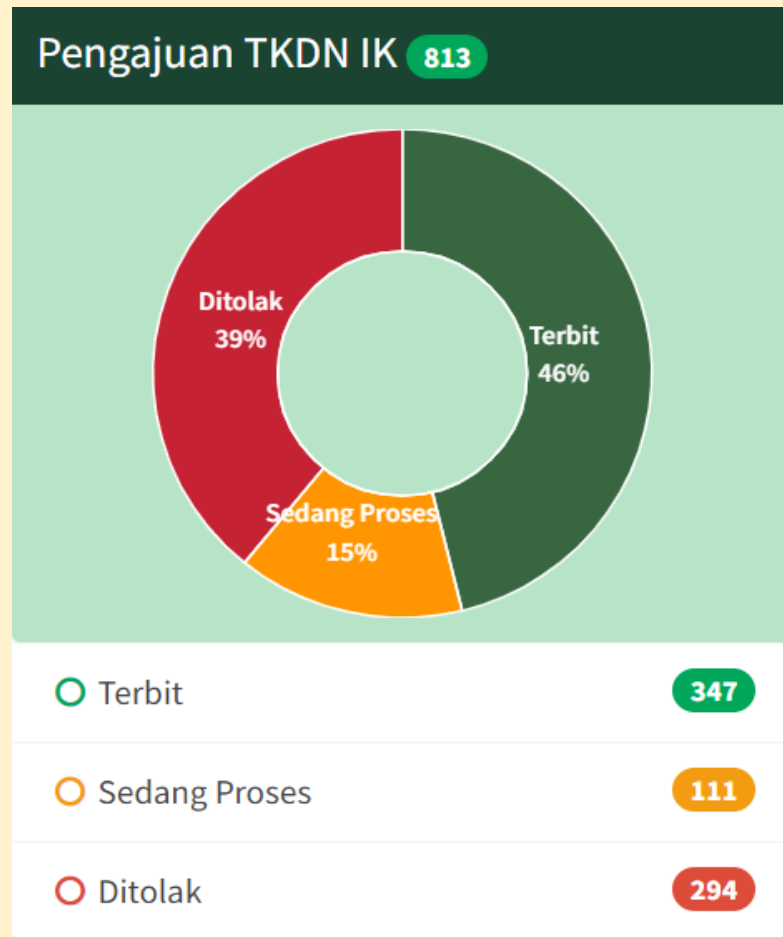
Slide #

28



Catatan :

- Sertifikat TKDN IK ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Sertifikat TKDN dicetak secara mandiri oleh Perusahaan.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan KBLI.
- Sertifikat TKDN IK berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2 (dua) Tahun.





Dirjen IKMA dapat membentuk Tim Pengawasan

PENGAWASAN

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh
DIREKTUR JENDERAL IKMA

Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**

Laporan hasil pengawasan disertai rekomendasi apabila terdapat:

- *Ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN IK Perusahaan Industri Kecil sesuai dengan Sertifikat*
- *Penyampaian data yang tidak benar*

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kapus P3DN dapat mencabut Sertifikat

- *Perusahaan IK yang telah dicabut Sertifikatnya tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat TKDN IK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan Sertifikat*

PENETAPAN POKJA VERIFIKASI TKDN IK KEPMENPERIN 3564/2022

menetapkan susunan pengurus
(Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris)
dan 224 Anggota (Verifikator)

Pokja Verifikasi memiliki tugas:

1. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran isian data dan dokumen permohonan;
2. melakukan verifikasi hasil penghitungan sendiri nilai TKDN IK;
3. menyusun rekapitulasi hasil pelaksanaan verifikasi nilai TKDN IK;
4. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi nilai TKDN IK;
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pokja Verifikasi; dan
6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi nilai TKDN IK.

SOSIALISASI DAN BIMTEK

teknis verifikasi
bagi pokja verifikator

- Jakarta, 4 Januari 2023, dihadiri oleh 224 anggota pokja verifikator secara luring dan daring.
- Serpong, 30-31 Januari 2023, dihadiri oleh 224 anggota pokja verifikator secara luring dan daring.

SOSIALISASI DAN BIMTEK

pendaftaran dan pengajuan sertifikasi tkdn ik
bagi perusahaan industri kecil

- Serpong, 20 desember 2022. dilakukan hybrid, dihadiri 70 peserta secara luring dan 1.129 peserta secara daring.
- Banda Aceh, 10 Januari 2023. dilakukan hybrid.
- Balai Kota DKI, 7 Februari 2023. dilakukan luring.

SOSIALISASI DAN BIMTEK

pendaftaran dan pengajuan sertifikasi tkdn ik
bagi aparat pemerintah daerah

- Serpong, 7-10 maret 2023, Bimbingan Teknis Optimalisasi Pendataan Industri Kecil Melalui SIINas

PENYEBAB TKDN IK DITOLAK OLEH VERIFIKATOR

Slide #

32

1

KBLI Tidak Sesuai Dengan Produk

2

Perusahaan Tidak Termasuk Industri Kecil

3

Tidak Mengunggah Bukti Pembelian Komponen Utama
Dari Dalam Negeri

4

Sertifikat Standard Belum Terverifikasi
Untuk Skala Risiko Selain Risiko Rendah

5

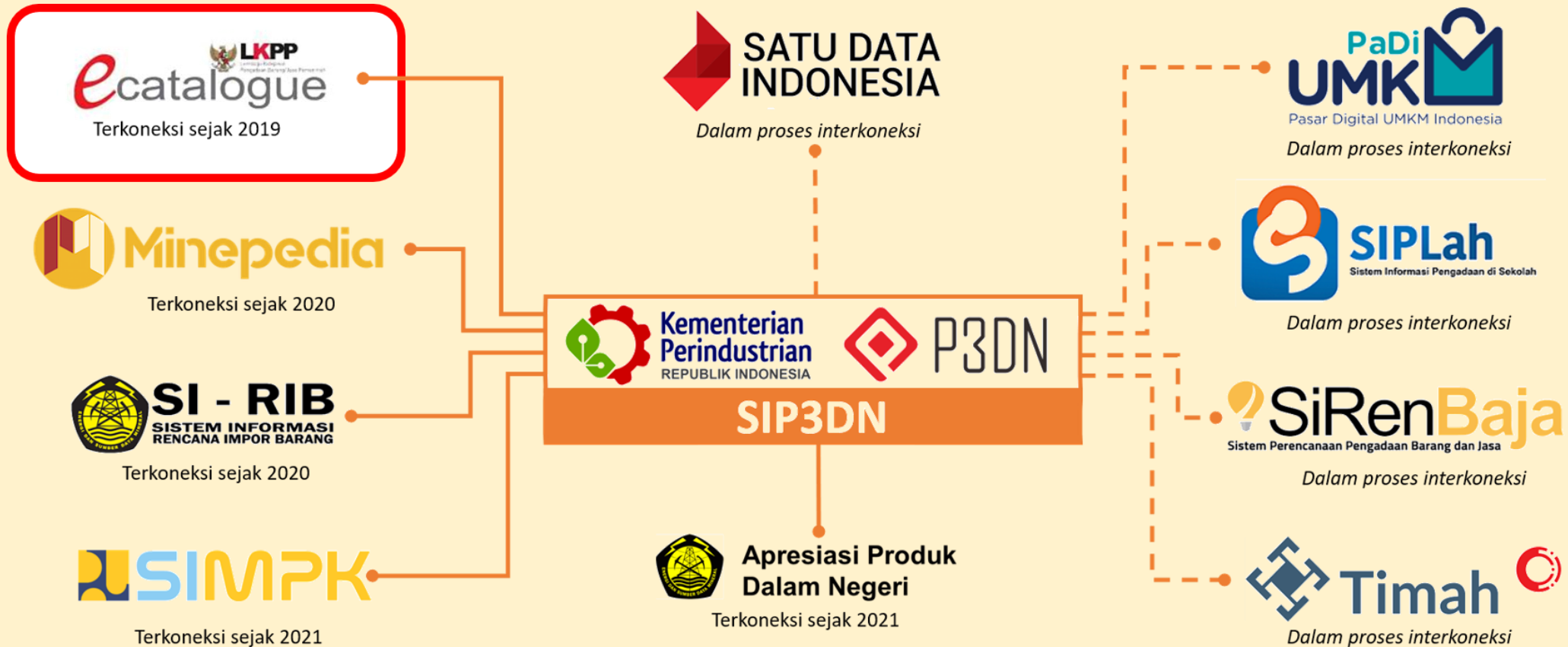
Produk Alkes Dan Farnasi Tidak Mengunggah
Sertifikat Izin Edar (NIE)



04

TKDN DALAM
E-KATALOG

INTERKONEKSI DATABASETKDN



Data TKDN **diintegrasikan/diinterkoneksi** dengan berbagai aplikasi milik pemerintah lainnya untuk memudahkan implementasi P3DN

1 Integrasi data TKDN ke dalam Katalog Elektronik LKPP secara *real time*

→ e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/3227216?lang=id&type=general

ecatalogue Etalase Produk Cari

Beranda Pengumuman Berita Monev Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Spesifikasi Lampiran Referensi Ongkos Kirim Diskusi Produk Rating Penyedia

Nama Produk	Chromebook M432
Masa Berlaku Produk	2024-12-31
Merek	ZYREX
No. Produk Penyedia	FN.NB.ZRXCRCM-BOOKM432
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	PDN
Kode KBKI	4522100001
Nilai TKDN(%)	37.09
Nilai BMP	15.00
Nilai TKDN + Nilai BMP	52.09
Nama Pemilik Sertifikat	PT. Zyrexindo Mandiri Buana

→ Not secure | tkdn.kemenperin.go.id//sertifikat.php?id=3IKd99AQjYNGx5

HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ REGULASI VID

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Zyrexindo Mandiri Buana
No. Sertifikat	1028/SJ-IND.8/TKDN/4/2021
Tanggal	23 April 2021
Hasil Produksi	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer
Kode HS	84713020
No Referensi	TKDN - 21 - 18413
Sertifikat BMP	No. 14/SJ-IND.8/BMP/IV/2022
Nilai BMP	15.00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	Notebook
Merk dan Tipe	zyrex Zyrex Chromebook M432
Spesifikasi	Celeron N series, RAM 4GB, Storage 32GB - 64GB, Layar 11,6"
Standard	-
Nilai TKDN	37.09%

2 Produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dapat mendaftarkan produknya ke dalam katalog elektronik LKPP melalui **etalase TKDN**

Katalog Elektronik v.5.0

National Local Sectoral Small Business Innovation TKDN

CALON PENYEDIA → Mendaftar dan memasukkan produk → produk tayang di e-katalog ETALASE TKDN

Seluruh proses dilakukan melalui LPSE Kemenperin <https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/>

UNTUK MENJADI PERHATIAN PP/PPK

Slide #

36

Penyederhanaan Pendaftaran E-Katalog: 9 Langkah menjadi 2 Langkah



Tanpa Verifikasi: Penyalahgunaan Sertifikat TKDN

Dikarenakan nilai TKDN yang “diklaim” besar, sehingga produk tersebut muncul di **halaman pertama** pencarian, yang seharusnya diisi oleh produk-produk ber-TKDN

→ e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/3227216?lang=id&type=general

ecatalogue Etalase Produk Cari

Beranda Pengumuman Berita Monev Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Spesifikasi Lampiran Diskusi Produk Rating Penyedia

Nama Produk	Nitro 5 AN515-58
Masa Berlaku Produk	2023-12-31
Merek	Acer
No. Produk Penyedia	AUT0030
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	PDN
Kode KBKI	4522100001
Nilai TKDN(%)	80.15
Nilai BMP	-
Nilai TKDN + Nilai BMP	80.15

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT. Tri Usaha Sejahtera Pratama
No. Sertifikat	2823/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
Tanggal	29 Juni 2021
Hasil Produksi	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
Kode HS	63053310
No Referensi	PTKDN - 2100377 - 21448
Verifikator	PT. Sucofindo
Jenis Produk	: Karung Plastik
Merk dan Tipe	: --
Spesifikasi	: Kapasitas: 5-100 Kg
Standard	: -
Nilai TKDN	: 80.15%





Terima Kasih



Kontak Layanan Pusat P3DN

0812-3644-6344